

SINOPSIS

Dari sisi buruh, setiap kebijakan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang telah ditetapkan, pasti tidak memuaskan mereka karena berbagai alasan pemenuhan kebutuhan. Dari kasus demonstrasi buruh yang terjadi hampir seluruhnya menuntut masalah kenaikan upah. Peran buruh dalam formulasi dapat dilihat dari tahap-tahap formulasi kebijakan UMP. Besarnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sering tidak terealisasi dalam penentuan upah minimum, sehingga nilai nominal KHL tersebut pada umumnya direduksi untuk kemudian direalisasikan dalam kebijakan upah minimum. Banyak kalangan khawatir bahwa proses penentuan UMP tidak benar-benar menggunakan kalkulasi rasional yang obyektif dalam menghitung variabel-variabel tersebut, sehingga yang muncul adalah anggapan bahwa lebih banyak terjadi bargaining politik terhadap nominal UMP terlepas dari kalkulasi rasional dan obyektif terhadap variabel-variabel tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Propinsi DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai peran buruh dalam proses formulasi kebijakan upah minimum propinsi DIY Tahun 2007. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian peran buruh dalam proses formulasi kebijakan UMP Tahun 2007 adalah : 1) Peran buruh secara universal dapat dikatakan masih lemah mengingat. posisi tawar buruh di dalam sidang penentuan kebijakan UMP juga masih lemah karena terjadi kerja sama mutualisme yang erat antara pengusaha dengan pemerintah sehingga posisi pekerja menjadi marginal yang menempati suara minimal dalam sidang Dewan Pengupahan ketika keputusan akhir di tentukan dengan cara voting. 2) Pemerintah masih terasa mendominasi dalam proses pengambilan keputusan dalam sidang Dewan Pengupahan. 3) Penetapan parameter KHL masih menjadi kewenangan pemerintah pusat (Badan Pusat Statistik) dan tidak terjadi perubahan parameter dalam jangka waktu yang regular. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian parameter KHL dengan kondisi riil di lapangan yang sangat rentan terhadap perubahan, situasional dan berbeda untuk masing-masing daerah maupun masing-masing jenis kelamin.

Saran dalam penelitian ini demi menaikkan posisi tawar pekerja, maka para ketua serikat pekerja baik dari tingkat DPC dan DPD perlu meningkatkan frekuensi pendekatan persuasi kepada pekerja-pekerja di level perusahaan agar nasib dan aspirasi mereka dapat ditampung melalui wadah SPSI dan berusaha bersama-sama memperjuangkannya. Setiap ketua unit kerja SPSI juga diharapkan mampu mengikuti rantai proses produksi yang berlangsung di dalam perusahaan tempat mereka bekerja sehingga dari keadaan tersebut muncul transparansi yang membuat para pekerja mengerti betul gambaran keadaan keuangan perusahaan.